

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Farid, A. Z. (2010). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2011). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Merpaung, L. (2011). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Soemitro, R. H. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M, Peter (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Sofyan Andi & Abd. Asis (2014). *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group,
- Chazawi, A. (2010). *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2008). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar grafika.
- Harahap, M. Y. (2005). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, L. (2007). *Hukum Acara Pidana Normatif, teoritis, Praktik dan Prmasalahannya*. Bandung: PT. Alumni.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sofyan, A. (2017). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaidan, A.M. (2015). *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

_____, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

_____, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

C. Jurnal

Rizqi, K. P. (2021). Upaya Hukum yang Dapat Dimohonkan Terhadap Putusan Perkara Pidana yang Ne Bis In Idem. *Jurist Diction* Vol. 4. No. 1.

Novianti. (2019). Putusan Bebas Terkait Perkara Korupsi Sofyan Basir. *Info Singkat*. Vol.XI. No.21.

Lamsu, A. (2014). Upaya Hukum Pada Tingkat Kasasi Terhadap Putusan Bebas (Verkapte Vuspraak) Dalam Perkara Pidana. *Lex Crimen*. Vol. III. No.4.

Tambunan, E. S. (2014). Pembatasan Permohonan Kasasi Dalam Penerapannya (Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45 A Ayat 2). *Jurnal Ilmiah Universitas Batabghari Jambi*. Vol. 14. No.1.

Yani, A. (2013). Upaya Hukum Banding dan Kasasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.1. Edisi 3

Ramelan. (2009). Kasasi Terhadap Putusan Bebas. *Jurnal Hukum Prioris*, Vol.2.No.3

Monteiro, M.J. (2007). Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol. 25. No. 2

Grimaldi, W.F. (2016). Putusan Bebas Judex Facti Akibat Mengabaikan Alat Bukti Petunjuk Karena Terdakwa Mencabut Keterangan Dalam BAP Penyidik Tanpa Alasan Yang Relevan (Studi Putusan

Mahkamah Agung Nomor 997 K/PID/2016). *Jurnal Verstek*, Vol.3. No.3

Emmy Sri MT. (2014). Pembatasan Permohonan Kasasi Dalam Penerapannya. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.14 No.1.

D. Sumber Online

JDIH, *Upaya Hukum Biasa (Bandung, Kasasi dan Verzet)*, diakses dari <http://www.jdih.karimunkab.go.id/index.php/artikel/hukum/170-upaya-hukum-biasa> banding-kasasi-dan-verzet, pada tanggal 10 Maret 2021, pukul 19.35 WIB

Ramelan, *Kasasi Terhadap Putusan Bebas*, diakses dari <http://media.neliti.com/media/publications/80965-ID-kasasi-terhadap-putusan-bebas>, pada tanggal 11 Maret 2021, pukul 10.40 WIB

Paralegal, *Upaya Hukum Menurut Undang-Undang*, diakses dari <http://paralegal.id/pengertian/upaya-hukum/>, pada tanggal 11 Maret 2021, pukul 12.30 WIB

